



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BALANGAN**

**RENJA
TAHUN
2022**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, hidayah atas segala bimbingan dan petunjuk Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Balangan menyusun rencana kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk bertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan RENJA Tahun 2022 ini dan dengan segala kerendahan hati kami memohon saran, tanggapan dan kritik yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan pembuatan RENJA ini di masa yang akan datang.

Paringin, 2022
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Drs.Urai Nur Iskandar, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730501 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2021	6
2.2 Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54
BAB III	55
TUJUAN DAN SASARAN	55
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	55
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	57
3.2.1 Tujuan.....	57
3.2.2 Sasaran.....	57
3.3. Program dan Kegiatan	58
BAB IV	65
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Balangan harus menyusun rencana kerja (RENJA) yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Yang sebelumnya merupakan gabungan 3 (tiga) Urusan Pemerintah yang berdiri sendiri. Namun dikarenakan adanya perampingan Perangkat Daerah (PD), maka penyelenggaraan penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial digabung menjadi satu kesatuan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah dengan lebih menekankan pada peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak guna mewujudkan kesetaraan, keadilan gender dan memenuhi hak-hak anak dan perempuan pada seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Serta peningkatan status/klasifikasi desa minimal maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

1.2 Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
7. Instruksi Presiden nomor 09 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95).
17. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018).
18. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan daerah Kabupaten Balangan

19. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika penulisan

- BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2020
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 3.3 Program dan kegiatan
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- Memuat tentang uraian program dan kegiatan beserta pendanaannya.
- BAB V. PENUTUP
- Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA TAHUN 2020

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2016-2021.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2021

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah tentang peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak guna mewujudkan kesetaraan, keadilan gender dan memenuhi hak-hak anak dan perempuan pada seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Serta peningkatan status/klasifikasi desa minimal maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM yang dilaksanakan secara berkelanjutan, terintegrasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, memuat tujuan, sasaran dan strategi yang realistis. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Pada Tabel TC.29 akan memuat Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sd tahun 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Balangan yang terdiri dari 3 urusan yaitu urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel TC.29 Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2020

Kode	Usunan/Bidang Usunan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan (Pemandagri 13)	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja capaian program Renstra SKPD tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun (2019)		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2020			Usunan/Bidang Usunan Pemerintah Daerah dan program/kegiatan (Kepmen 050)	Indikator	Target program dan sub kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2021)	Prakiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan			
			100	%	K	%	Target kinerja Renja SKPD tahun berjalan 2020	Realisasi capaian kinerja Renja SKPD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD pada tahun (2020) (%)				Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)		
1	2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10		11		12=(6+7+11)	13=(12/4)
			K		K		K	K	K							
Usuran Bidang Sosial																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100	%	50	%	100	100,00	100,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarananaparatuyang baik, tingkat disiplin aparatur, tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, nilai SAKIP SKPD	100	%			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan	60	83%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	60	83%	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan dan honorarium pelaksanaan kegiatan	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dan Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	60	83%	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%		12	bulan	60	83%		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	12	bulan	60	83%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	bulan	60	83%	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik untuk penerangan kantor	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	bulan	60	83%	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	bulan	60	83%	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, koran untuk pegawai	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	bulan	60	83%	
	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat dinas dan tamu kantor (bulan)	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12	bulan	60	83%	

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah (bulan)	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	12	bulan	60	83%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah tercapai (%)	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	12	bulan	60	83%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	prosentase meubeler penunjang kegiatan perkantoran (%)	100	%	100	%	100	100	100,00%						
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	12	bulan	60	83%
	Pengadaan Komputer	Jumlah Perangkat komputer yang dibeli	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%			12	bulan	60	83%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12	bulan	60	83%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12	bulan	60	83%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor(bulan)	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12	bulan	60	83%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor(%)	0	bulan	0	bulan	0	0	0,00%			0	bulan	0	#DIV/0!
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100	%	100	%	100	100	100,00%						
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	160	stel	0	stel	0	0	0,00%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	35	lembar	35	22%
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	160	stel	80	stel	40	40	0,00%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	35	stel	155	97%

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	50	%	100	75	75,00%						
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	bulan	60	83%
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase penanganan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	100	%	50	%	100	100	100,00%						
	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya (orang)	Jumlah pendamping sosial yang melaksanakan pendamping KUBE	150	orang	75	orang	8	8	100,00%	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendamping Sosial yang melaksanakan pendampingan KUBE	0	orang	83	55%
	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan KUBE (16 KUBE)	800	Kube	80	Kube	40	40	100,00%	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah rumah layak huni setelah mendapat bantuan. Dan Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan Kube	0	Kube	120	15%
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah rumah layak huni setelah mendapatkan bantuan	40	RS-RTLH	40	RS-RTLH	40	40	100,00%			0	RS-RTLH	80	200%
	Operasional Program Raskin	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial rastra	6083	Jiwa	6.759	jiwa	6083	24130	396,68%	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan	10	jiwa	30.899	508%
	Penjajakan Awal dan Pelaksanaan Program KAT	Jumlah rumah warga KAT yang terbangun	1	lokasi	1	Lokasi	1	0	0%	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian sosial	1	Lokasi	2	200%
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	450	KK	200	KK	80	80	100,00%	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapat pembinaan	60	kk	340	76%
	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	prosentase cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	100	%	20	%	100	100	100,00%						
	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan manusia dan anak	Jumlah orang terlanjar yang dilayani	45	orang	1	orang	10	0	0,00%	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang terlanjar yang dilayani	1	orang	2	4%
	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dan bantuan	3000	nuta	500	nuta	500	749	149,80%	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dan bantuan.	4566	nuta	5.815	194%
	Pelayanan dan perlindungan sosial lansia	Jumlah lansia yang menerima bantuan sembako	3880	jiwa	8	jiwa	400	400	100,00%	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Lansia yang menerima bantuan sembako	400	jiwa	808	21%
	Pembinaan Petugas Penanggulangan Bencana Daerah (Anggota Tagana)	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan	75		53		43		66,67%					53	71%

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	prosentase anak terlantar yang mendapatkan pembinaan	100		30		100		sedang				30	30%	
	Pembinaan Petugas Penanggulangan Bencana Daerah (Anggota Tagana)	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan	75	orang	53	orang	43	43	100,00%	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	43	orang	139	185%
	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	prosentase anak terlantar yang mendapatkan pembinaan	100	%	30	%	100	65	65,00%						
	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan bantuan alat keterampilan	300	orang	30	orang	40	35	87,50%	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan bantuan alat keterampilan	27	orang	92	31%
	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	Prosentasi penyandang cacat dan eks trauma yang terbina	100	Buah	41	Buah	100	100	100,00%						
	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan fasilitas pendidikan dan bantuan alat disabilitas	127	orang	96	orang	6	2	33,33%			0		98	77%
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan bantuan alat keterampilan	127	orang	8	orang	48	48	100,00%	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan bantuan alat keterampilan	48	orang	104	82%
	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	Prosentase pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo	100	%	20	%	100	100	100,00%						
	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo	Jumlah panti asuhan dan orsos yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	36	LKS	18	LKS	6	6	100,00%	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orsos yang mendapatkan pembinaan sosial	6	LKS	30	83%
	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA	100	20	%	0	%	100	150	150,00%						
	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Korban Nafza yang Terkirim	20	orang	0	orang	4	6,00	150,00%	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah klien korban Nafza yang dikirim kepanti rehabilitasi	5	orang	11	55%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Prosentasi warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan kalangan dunia usaha yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial. (%)	100	%	96	%	100	100	100,00%						
	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah rapat tentang usulan pengumpulan Uang dan barang (PUB) yang direkomendasikan	36	rekomendasi	18	rekomendasi	3	2	66,67%	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	1	rekomendasi	21	58%
	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PSKS yang mengikuti lomba prestasi	120	orang	60	orang	20	20	100,00%						0%
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah organisasi karang taruna yang mengikuti diklat keterampilan dan kemah Bakhti karang taruna	157	KT	157	KT	15	15	100,00%						0%
	Bimbingan Pemantapan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah PSM yang mengikuti diklat keterampilan dan temu karya bakti sosial	120	orang	60	porang	20	20	100,00%						0%
	Penyuluhan Sosial Masyarakat	Jumlah peserta penyuluh tentang PMKS	8	orang	8	orang	8	30	375,00%						0%
	Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat	Jumlah Orsos yang mendapatkan pembinaan sosial	8	orsos	8	orsos	15	15	100,00%						0%
	Pembinaan Kepahlawanan	Jumlah perangkat sarana makam pahlawan yang terpasang	1	TMP	1	TMP	1	1	100,00%	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat sarana makam pahlawan yang terpasang	1	TMP	1	100%
	PROGRAM KELUARGA HARAPAN	prosentase KSM yang mendapatkan pelayanan sosial	100	LKS	100	LKS	100	100	100,00%						0%
	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan PKH	12.084	KK	12.084	KK	2257	14012	620,82%						0%
	PROGRAM BASIS DATA PMKS PSKS TERPADU	Prosentase basis Data PMKS PSKS Terpadu	100	%	100	%	100	100	100,00%						0%
										Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bantuan sosial yang disalurkan	8	bulan		
	Pendataan PMKS PSKS	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	148570	ruta	29714	ruta	12084	11518	95,32%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	4208	ruta	45.440	31%

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
2.02.2.02.1.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian aparatur DPPPA	100		100		100	117,1	117,10%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik, tingkat disiplin aparatur, tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, nilai SAKIP SKPD	100	%		
2.02.2.02.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	60	83%
2.02.2.02.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang diberikan honor	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	bulan	60	83%
2.02.2.02.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah paket alat dan bahan pembersih	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	60	83%
2.02.2.02.1.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	72	bulan	36	bulan	12	12	100,00%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12	bulan	60	83%
2.02.2.02.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	16	paket	9	paket	4	4	100,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	23	item	36	225%
2.02.2.02.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	610	Buku	144	Buku	70	75	107,14%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	180	buku	399	65%
2.02.2.02.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/bahan bacaan yang tersedia	4320	Exampler	2040	Exampler	720	720	100,00%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	730	exampler	3490	81%
2.02.2.02.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan/minuman dan snack rapat dan tamu	2650	porsi	511	porsi	475	665	140,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	530	porsi	1706	64%
2.02.2.02.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	378	orang	133	orang	35	67	191,43%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	67	OP	267	71%
2.02.2.02.1.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	350	orang	98	orang	47	48	102,13%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	180	OP	326	93%
2.02.2.02.1.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%	100	%	100	100	100,00%						
2.02.2.02.1.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah terbentuknya parkir	3	buah	0	buah	1	1	100,00%					1	33%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2.02.2.02.1.02.14	Pengadaan Komputer	Jumlah pengadaan komputer untuk kantor	34	buah	12	buah	5	5	100,00%					17	50%
2.02.2.02.1.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	7	buah	1	buah	6	6	100,00%					7	100%
2.02.2.02.1.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	18	buah	36	buah	8	8	100,00%					44	244%
2.02.2.02.1.02.07	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeluar kantor	31	buah	0	buah	40	40	100,00%					40	129%
2.02.2.02.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	buah	1	buah	1	1	100,00%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	buah	1	100%
2.02.2.02.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	66	buah	47	buah	9	9	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	2	buah	58	88%
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	buah	1	#DIV/0!
2.02.2.02.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100		29,57	-	0	0	0,00%						
2.02.2.02.1.03.02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tertaksananya pengadaan pakaian utk hari2 khusus untuk pegawai	186	lembar	55	lembar	0	0	0,00%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	35	lembar	90	48%
2.02.2.02.1.03.05	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tertaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya untuk pegawai	186	stel	55	stel	0	0	0,00%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	35	stel	90	48%
2.02.2.02.1.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100		100	-	100	91,67	91,67%						
2.02.2.02.1.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	75	orang	34	orang	12	11	91,67%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	orang	60	80%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2.02.2.02.1.06	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	100		100	-	100	100	100,00%						
2.02.2.02.1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24	Dokumen	16	Dokumen	4	4	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dokumen	24	100%
2.02.2.02.1.06.05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	24	Dokumen	12	Dokumen	4	4	100,00%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	4	dokumen	20	83%
2.02.2.02.1.20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1. Persentase anggaran yang responsive gender (ARG) pada belanja langsung APBD kabupaten Balangan.	5,5	%	7,25	%	5	12,35	247,00%	2.08-02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase anggaran yang responsive gender (ARG) pada belanja langsung APBD kabupaten Balangan ; Persentase keterlibatan perempuan di parlemen	5,5	%	12,35	225%
		2. Persentase keterlibatan perempuan di parlemen	15		16		15	16	106,67%			15		16	107%
2.02.2.02.1.20.02	Pelatihan pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi SDM pada lembaga pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PUG termasuk PPRG	600	Orang	141	Orang	50	50	100,00%	2.08-02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PUG termasuk PPRG	45	orang	236	39%
2.02.2.02.1.20.03	Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Jumlah pameran yang diikuti	5	Kali	3	Kali	1	0	0,00%	2.08-04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti	1	kali	4	80%
2.02.2.02.1.20.04	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan	300	Orang	180	Orang	0	0	0,00%					180	60%
2.02.2.02.1.20.05	Pelatihan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan	600	Orang	0	Orang	102	102	100,00%	2.08-02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi kemasyarakatan	100	orang	202	34%
2.02.2.02.1.21	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100	%	100	%	100	100	100,00%	2.08-03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPPO	100	%	100	100%
2.02.2.02.1.21.01	Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	360	Orang	183	Orang	100	100	100,00%	2.08-03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	200	orang	483	134%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2.02.2.02.1.22	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perkawinan usia anak di kabupaten Balangan	0,97	%	1	%	1	1,48	52,00%	2.08-04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perkawinan usia anak di kabupaten Balangan	0,97	0,97	1,48	47,42%
		Indeks ketahanan keluarga didesa atau kelurahan yang dibina	60				60	52,67	87,78%		Indeks ketahanan keluarga didesa atau kelurahan yang dibina	60	60	60	100%
2.02.2.02.1.22.04	Peningkatan kualitas keterampilan perempuan	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	45	orang	30	orang	0	0	0,00%	2.08-04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	10	orang	40	89%
2.02.2.02.1.22.05	Penyuluhan dalam pencegahan perkawinan usia anak	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	1050	orang	550	orang	220	220	100,00%	2.08-04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	280	orang	1050	100%
2.02.2.02.1.22.06	Kegiatan pembinaan peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera dan kecamatan sayang ibu	Jumlah pembinaan desa TPK2D	60	kali	24	kali	3	3	100,00%	2.08-04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan desa TPK2D	12	12 kali	39	65%
2.02.2.02.1.22.07	Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kesetaraan gender dan hak anak kepada kader dan pengurus organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan	3	organisasi	1	organisasi	0	0	0,00%					1	33%
2.02.2.02.1.23	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Jumlah Desa Peduli Anak (Depan) Kab. Balangan	10	%	5	%	2,5	2,5	100,00%	2.08-06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Jumlah Desa Peduli Anak (Depan) Kab. Balangan	3	%	10	100%
2.02.2.02.1.23.02	Pelatihan tenaga terlatih pemenuhan hak anak dalam pengembangan puskesmas ramah anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	90	orang	26	orang	15	15	100,00%	2.08-06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	28	orang	69	77%
2.02.2.02.1.23.03	Penyuluhan pemenuhan hak anak di posyandu	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	320	orang	79	orang	0	0	0,00%					79	25%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2.02.2.02.1.23.04	Pelatihan tenaga terlatih pemenuhan hak anak dalam pengembangan sekolah ramah anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	300	orang	72	orang	20	20	100,00%	2.08-06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	30	orang	122	41%
2.02.2.02.1.23.05	Koordinasi pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah peserta yang mengikuti temu forum anak daerah	600	orang	188	orang	40	40	100,00%	2.08-06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti temu forum anak daerah	50	orang	278	46%
		Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan forum anak desa	450	orang	115	orang	120	120	100,00%		Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan forum anak desa	90	orang	325	72%
		Jumlah forum desa anak yang dibina	15	FAD	8	FAD	4	4	100,00%		Jumlah forum desa anak yang dibina	3	FAD	15	100%
2.02.2.02.1.23.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup dan anak	Jumlah buku data profil anak	100	buku	50	buku	25	25	100,00%	2.08-06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku data profil anak	25	buku	100	100%
2.02.2.02.1.23.07	Advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi desa layak anak	350	orang	105	orang	120	120	100,00%	2.08-06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi desa layak anak	50	orang	275	79%
2.02.2.02.1.24	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Persentase perlindungan khusus anak	100	%	100	%	100	100	100,00%	2.08-07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus anak yang terlayani	100	%	100	100%
2.02.2.02.1.24.02	Penatalaksanaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap P2TP2A	100	%	74,88	%	0	0	#DN/0!					74,88	75%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2.02.2.02.1.24.03	Pelatihan kader dan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	1. Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator	420	orang	170	orang	0	0	0,00%	2.08-07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator	140	orang	310	74%
		2. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PATBM	1080		404		225	225	100,00%		2. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PATBM	200	orang	829	77%
2.02.2.02.1.24.04	Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase Jumlah pendampingan yang dilaksanakan	100	%	100	%	100	100	100,00%	2.08-07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah pendampingan terhadap anak yang dilaksanakan	100	%	300	300%
2.02.2.02.1.24.01	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	600	orang	0	orang	50	50	100,00%	2.08-07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	120	anak	170	28%
2.02.2.02.1.27	Program Pengelolaan Sistem Data Kekerasan Perempuan dan Anak, Gender dan anak	Persentase Jumlah SKPD yang memanfaatkan data gender dan anak dalam penyusunan program/ kegiatan	100	%	85	%	100	100	100,00%	2.08-05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Jumlah SKPD yang memanfaatkan data gender dan anak dalam penyusunan program/ kegiatan	100	%	100	100%
2.02.2.02.1.27.01	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Jumlah buku data gender anak yang dicetak	123	buku	35	buku	35	35	100,00%	2.08-05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku data gender anak yang dicetak	35	buku	105	85%
2.02.2.02.1.27.02	Sosialisasi dan workshop updating data e-kekerasan perempuan dan anak	Jumlah admin dan operator yang melaksanakan updating e kekerasan perempuan dan anak	57	orang	26	orang	19	13	68,42%	2.08-05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah admin dan operator yang melaksanakan updating e kekerasan perempuan dan anak	19	orang	58	102%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	100	%	100	100	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD	100	%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan jasa layanan telepon, air, listrik kantor	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kegiatan Jasa Layanan Telepon, Air, Listrik Kantor (Bulan)	12	Bulan	60	100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan jasa administrasi Keuangan	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan (12) , Jumlah Peralatan Kerja Dalam Kondisi Baik dan Bisa Menunjang Pekerjaan (12) (Bulan)	12	Bulan	60	100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan (12) , Jumlah Peralatan Kerja Dalam Kondisi Baik dan Bisa Menunjang Pekerjaan (12) (Bulan)	12	Bulan	60	100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja dalam kondisi baik dan bisa menunjang pekerjaan	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan (12) , Jumlah Peralatan Kerja Dalam Kondisi Baik dan Bisa Menunjang Pekerjaan (12) (Bulan)	12	Bulan	60	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK dan benda Pos	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ATK dan benda pos Jumlah kegiatan makan dan minum tamu dan rapat Jumlah terselenggara rapat-rapat dan koordinasi luar daerah propinsi dan luar daerah dalam propinsi	12	Bulan	60	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah spanduk, barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Spanduk, Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	12	Bulan	60	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan penerangan dan listrik untuk bangunan kantor	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kegiatan Penerangan dan Listrik Untuk Bangunan Kantor (Bulan)	12	Bulan	60	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bulan)	12	Bulan	60	100%

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang -undangan	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang -undangan (Bulan)	12	Bulan	60	100%
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan makan dan minum tamu dan rapat	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ATK dan benda pos Jumlah kegiatan makan dan minum tamu dan rapat Jumlah terseleenggara rapat-rapat dan koordinasi luar daerah luar propinsi dan luar daerah dalam propinsi	12	Bulan	60	100%
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah terseleenggara rapat-rapat dan koordinasi luar daerah luar propinsi dan luar daerah dalam propinsi	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ATK dan benda pos Jumlah kegiatan makan dan minum tamu dan rapat Jumlah terseleenggara rapat-rapat dan koordinasi luar daerah luar propinsi dan luar daerah dalam propinsi	12	Bulan	60	100%
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah terseleenggara rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dalam Kabupaten	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ATK dan benda pos Jumlah kegiatan makan dan minum tamu dan rapat Jumlah terseleenggara rapat-rapat dan koordinasi luar daerah luar propinsi dan luar daerah dalam propinsi	12	Bulan	60	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Baik	100	%	100	%	100	100	100%					200	200%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional					1		0%	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional		Buah	0	#DIV/0!
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (Buah)	1	buah	49	82%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	60	Bulan	36	Bulan	12	12	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (Buah)	12	Bulan	60	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100	%	100	%	100	100	100%						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	170	Stell	81	Stell	46	46	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (Stel)	46	Stell	173	102%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	100	%	100	100	100%						
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan yang di ikuti	160	Orang	94	Orang	37	35	95%	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan yang diikuti (OK)	13	OK	142	89%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat LAKIP Akuntabilitas dan Kinerja SKPD	68		64		70	70	100%						
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Dokumen	3	Dokumen	1	1	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	5	100%
Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah laporan pelaksanaan APBD	15	Dokumen	9	Dokumen	3	3	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Dokumen)	3	Dokumen	15	100%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Aktif	95	%	80	%	88	85,97	98%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	45	%	210,97	222%
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah kader teknis desa yang dilatih	540	Orang	491	Orang	145	0	0%					491	91%
Pembinaan PKK	Jumlah Posyandu yang dibina	203	Posyandu	115	Posyandu	40	28	70%	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah PKK Desa dan Kecamatan yang dibina di Kabupaten Balangan (162), Jumlah Posyandu yang dibina (49)	210	Orang	353	174%
Sosialisasi Pembentukan LPM	Jumlah LPM yang dibina	770	LPM		LPM	157		0%					0	0%
Sosialisasi Potensi Lokal Pemanfaatan SDA Bagi Masyarakat Pedesaan	Jumlah peserta yang mengerti akan potensi produk lokal pemanfaatan SDA bagi masyarakat pedesaan	770	Orang	462	Orang	154	0	0%					462	60%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga di Kab. Balangan	Jumlah PKK desa dan kecamatan yang di bina di Balangan	825		495		165	164	99%	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah PKK Desa dan Kecamatan yang dibina di Kabupaten Balangan (162), Jumlah Posyandu yang dibina (48)	162	PKK	821	100%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pedesaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	770	Organisasi	308	Organisasi	154	0	0%						
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Bumdes Aktif	25	%	10	%	15	23	153%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	45	%	78	312%
Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah peserta pelatihan pengurus BUM Desa dalam pengelolaan manajemn usaha BUM Desa	770	Orang	462	Orang	154	154	100%	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang berkembang	35	Bumdes	651	85%
Monitoring dan Evaluasi BUM Desa	Jumlah laporan hasil monitoring pengelolaan BUMDesa	100	Dokumen	68	Dokumen	24	6	25%	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang berkembang	35	Bumdes	109	109%
Pembinaan Kelompok TTG	Jumlah karya cipta inovasi dan teknologi pedesaan	154		97		5	5	100%	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Karya Cipta Inovasi dan Teknologi Pedesaan	154		256	166%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase masyarakat terlibat dalam pembangunan desa	90	%	80	%	90	85	94%	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	45	%	210	233%
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah SPAMS pedesaan	154		136		3	3	100%					139	90%

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Lomba Desa / Kelurahan	Jumlah desa mengikuti lomba	45	Desa	36	Desa	9	0	0%	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	11	%	47	104%
Pendampingan Pemberdayaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang didampingi Sarjana Pengerak Pembangunan Pedesaan (SP3)	770	Orang	460	Orang	154	153	99%	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang didampingi Sarjana Pengerak Pembangunan PEDESAAN (SP3)	154	Orang	767	100%
Program Peningkatan dan Penguatan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Melaporkan LPPD	100	%	99,35	%	99,35	99,35	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN LPPD TEPAT WAKTU	75	%	273,7	274%
Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan	Jumlah penentuan tapal batas desa/kelurahan	10		3		1	1	100%					4	40%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	770	Desa	462	Desa	154	154	100%					616	80%
Monitoring dan Evaluasi Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APB Desa	Jumlah laporan hasil monitoring pengelolaan aset desa	770	Dokumen	615	Dokumen	154	153	99%	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	70	%	838	109%
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah laporan hasil monitoring pengelolaan aset desa	770	Dokumen	615	Dokumen	154	153	99%	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	50	%	818	106%
Sosialisasi Penataan Aset Desa	Jumlah peserta yang paham akan penataan aset desa	770	Orang	462	orang	0	0	#DIV/0!					462	60%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa	770	Orang	615	Orang	154	0	0%	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum yang dievaluasi kabupaten	5	Produk	620	81%
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	770	Orang	615	Orang	154	153	99%	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	70	%	838	109%
Pelatihan Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi SIM Aset Desa	Jumlah petugas aset desa yang dilatih dalam pengelolaan aset desa berbasis aplikasi SIM aset desa	770	Orang	615	Orang	154	0	0%	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	50	%	665	86%

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD	Jumlah BPD yang Dibina	770	Orang	462	Orang	154	154	100%	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Jaminan Kesehatan Aparatur Desa	154	Orang	770	100%
Sosialisasi Produk Hukum Pusat dan/atau Produk Hukum Daerah Terkait Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta sosialisasi PHP/PHD terkait pengelolaan keuangan desa	50	orang	40	orang	10	5	50%					45	90%
Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kepala desa yang terpilih definitif di Kabupaten Balangan	154	Orang	134	Orang	19	0	0%	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades Serentak dan Pemilihan Anggota BPD	19	Desa	153	99%

2.2 Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Balangan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Proyeksi 2021	Catatan analisis
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
	Urusan Sosial															
	IKU															
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya				35,12%	36,18%	17%	30%	35%			12,24%	65,84%	40,95%	46,95%	
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial SPM				25,15%	25,15%	35,76%	35,76%	35,67%			18,85%	68,77%	65,96%		
1.	Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.										19,75%	52,95%	53,01%	20,66%		
2.	Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya											1,13%	3,60%	0,08%		
3.	Presentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat										1,81%	33%	13,60%	149,80%		
4.	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
	IKU SKPD														
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				92,59%	92,61%	92,64%	92,66%	92,69%	92,59%	92,61%	92,31%	92,32%	92,12%	92,71%
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				65,50%	65,53%	65,56%	65,58%	65,61%	65,50%	65,53%	65,79%	65,97%	69,55%	70,77%
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan				1,50%	1,50%	1,47%	1,44%	1,41%	1,50%	1,50%	0,09%	1,38%	1,59%	
4.	Rasio kekerasan terhadap anak				1%	1%	0,97%	0,94%	0,91%	1%	1%	0,17%	0,16%	0,21%	
	IKK														
5.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD						3,50%	4%	5%			4,80%	7,25%	12,35%	18%
6.	Persentase perkawinan usia anak						0,70%	1%	1%			0,70%	1%	1,48%	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
A	IKK														
1	PKK Aktif	-	-	-	156	156	156	156	165	156	156	156	156	165	
	Posyandu Aktif	-	-	-	273	273	273	273	355	273	273	273	273	355	
	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,65 %	50%	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	IK RPJMD														
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	-	-	-	-	0,5616	0,5897	0,6486	0,6810	-	0,5616	0,5724	0,6313	0,6395	0,6495
C	IKU SKPD														
1	Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Berkembang	-	-	-	-	-	39,61 %	46,10 %	84%	-	-	35,29	81,7	90,26 %	-

Urusan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada 26 jenis PPKS namun yang ditangani di Kabupaten Balangan hanya sembilan Jenis PPKS berjumlah 47.523 PPKS terdiri dari: Anak terlantar 177 orang, Anak berlawanan dengan hukum 14 orang, Lanjut Usia 3.325 orang, Penyandang Disabilitas 951 orang, Korban bencana Alam 721 KK, Korban Bencana Sosial 17 KK Perumpuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 1.079 orang, Fakir miskin 36.841 jiwa dan komunitas Adat Terpencil (KAT) 4.398 Jiwa.

Indikator Angka penyandang kesejahteraan sosial (PPKS) pada tahun 2020 menargetkan sebesar 35 % dengan Realisasi 40,95 % dengan capaian 117 % kategori capaian sangat berhasil, PPKS di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah 47.523 PPKS sedangkan PPKS yang terlayani sebanyak 19.446 PPKS atau 40,95 % sebagai berikut :

- a) Anak terlantar merupakan anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh namun di Kabupaten Balangan Anak terlantar berjumlah 177 orang bukan tanpa pengasuh namun hanya pendidikan anak tersebut yang tidak diperhatikan oleh orang tuannya atau keluarganya, Tahun 2020 yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan sebanyak 35 orang dikirim untuk mengikuti pendidikan pelatihan keterampilan melalui Panti Sosial Bina remaja (PSBR) atau dengan capaian 19,77 %.
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh serta mempunyai permasalahan dengan hukum di Kabupaten Balangan berjumlah 14 orang dan didampingi oleh Dinas Sosial untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut berupa pelecehan

- seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian dan penggunaan narkoba.
- c) Lanjut usia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di Kabupaten Balangan Lanjut usia terlantar berjumlah 3.325 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan berupa pemberian kebutuhan dasar berupa sembako kepada 800 orang, mendapatkan bantuan alat kebutuhan dasar berupa alat bantu lansia sebanyak 88 orang dari dan APBD, jumlah Lansia yang mendapatkan bantuan berjumlah 888 orang atau 26,70 % dari jumlah lansia ini sifatnya hanya bantuan konsuntif saja.
- d) Penyandang Disabilitas seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari – hari secara layak atau norma di Kabupaten Balangan berjumlah 951 orang, yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial dari Kabupaten Balangan sebanyak 99 orang, diberikan sembako sebanyak 80 orang dari Dana APBD, Disabilitas yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial pada tahun 2020 sebanyak 179 orang atau 18,82 %.
- e) Korban bencana alam orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia yang terjadi karena alam berupa banjir, longsor dan puting beliung dikabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah 721 Kepala Keluarga dengan 2.489 jiwa dan semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan berupa kebutuhan pokok sehari – hari.
- f) Korban bencana sosial orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa sosial yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa terjadinya kebakaran di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah
sebanyak 17 Kepala keluarga dengan 52 jiwa semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas sosial Kabupaten Balangan.

- g) Perempuan rawan sosial ekonomi seorang wanita yang karena faktor kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalani kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya, di Kabupaten Balangan berjumlah sebanyak 1.079 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan sebanyak 40 orang diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Dana APBD yang masing – masing mendapatkan bantuan berupa uang sebanyak Rp 1.000.000,- sehingga pada tahun 2020 Perempuan rawan social ekonomi yang mendapatkan pelayanan sebanyak 40 orang atau 3,70 %.
- h) Fakir miskin merupakan orang atau keluarga sangat sengsara yang serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, fakir miskin di Kabupaten Balangan berjumlah 36.841 jiwa atau 11.518 Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dari dinas sosial pada Tahun 2020 berupa sebanyak 6.214 Rumah Tangga mendapatkan Sembako, 3.604 Rumah Tangga mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dan 6.702 Rumah Tangga mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada keluarga Fakir Miskin yang terdampak Pandemi Covid 19 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Dana APBN). Sedangkan dari dana APBD 40 kepala keluarga mendapatkan Bantuan Rehab Rumah yang sifatnya menunjang kehidupan orang atau keluarga agar bisa menjalani kehidupan yang layak, sedangkan sifatnya meningkatkan produktifitas, pemberian Bantuan Usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBe) sebanyak 45 kelompok atau sebanyak 450 kepala keluarga, Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD sebanyak 767 Keluarga, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (APBN) sebanyak 6.702 Kepala Keluarga dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Fakir Miskin yang terdampak pandemi Covid- 19 sebanyak 100 Kepala Keluarga berupa tambahan modal usaha sebesar Rp 2.500.000,- dengan demikian Keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan dari Dinas Sosial pada Tahun 2020 sebanyak 17.467 Rumah Tangga atau 47,41 %.

- i. Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan orang atau keluarga menempati suatu wilayah yang sangat terpencil dan sangat sulit untuk mencapai bertempat tinggal antara keluarga satu dengan yang lain cukup jauh bahkan harus menumpuh waktu yang sangat lama, diKabupaten Balangan warga Komunitas Adat Terpencil terdapat di Kecamatan Halong di Desa Binuang Santang yaitu Libaru Sungkai dan Desa Marajai dan Kecamatan Tebing Tinggi Desa Ajung yang berjumlah sekitar 4.398 jiwa atau 1.272 Kepala keluarga Dinas sosial Kabupaten Balangan memberikan pelayanan yaitu berupa pembinaan keterampilan kepada warga komunitas adat terpencil pada tahun 2020 kepada sebanyak 80 Kepala keluarga atau 6,28 %

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena pada tahun 2020 pada dasarnya Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Balangan dipangkas untuk penanganan korban yang terdampak Pandemi Covid – 19 namun pengurangan Anggaran tersebut digunakan untuk membantu korban terdampak Pandemi Covid – 19 berupa Bantuan Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) baik dari APBD Kabupaten Balangan maupun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Permasalahan /Hambatan pada pelaksanaan sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas penyandang masalah kesejahteraan (PPKS) keterbatasan dari sumber daya manusia yang membidangi kesejahteraan sosial kurang seimbang dengan banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dimana peran dari Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) organisasi sosial, karang taruna, pendamping sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) sangat diharapkan keaktifanya dalam hal pembinaan dan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Balangan, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan sifatnya hanya memberikan untuk kebutuhan hidup (konsumtif). Solusi/Strategi Pemecahan masalah untuk mencapai sasaran memberikan pelatihan – pelatihan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) karang taruna, Organisasi Sosial, pendamping sosial masyarakat dan tenaga

kesejahteraan sosial kecamatan agar lebih mantap dalam melaksanakan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lebih merata dan memprioritaskan program kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan produktifitas supaya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) bisa mandiri, dari pada yang bersifat konsumtif tidak akan berkembang dan berkoordinasi dengan Dinas/instansi lain terkait pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna mencapai sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Indeks pembangunan gender kabupaten Balangan pada tahun 2020, menggunakan realisasi capaian IPG tahun 2019, capaian IPG pada tahun 2019 sebesar 92,12 yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,2%. Hal ini sejalan dengan rata-rata lama sekolah laki-laki di tahun 2020 meningkat lebih banyak dari tahun sebelumnya dibandingkan perempuan yaitu 0,33% untuk laki-laki dan 0,18% untuk perempuan. Begitu juga dengan pengeluaran perkapita laki-laki di tahun 2020 meningkat menjadi Rp.151.000,- dibandingkan perempuan yang hanya meningkat Rp. 108.000,-. Pengeluaran perkapita ini merupakan pendekatan pendapatan masyarakat yang artinya jika pengeluaran semakin bertambah maka sejalan dengan penambahan pendapatan sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat.

IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan. IDG ini digunakan untuk mengukur persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Indeks pemberdayaan gender kabupaten Balangan pada tahun 2020, menggunakan realisasi capaian IDG tahun 2019, capaian IDG pada tahun 2020 sebesar 69,55% yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar

3,58%. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi dan politik semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibandingkan tahun sebelumnya. Program-program pemerintah dalam hal peningkatan kapabilitas gender perlu terus didorong guna mengurangi jarak (gap) kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya dapat diselenggarakan secara lebih setara.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2020 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu yaitu terdapat 16 kasus yang terdiri dari sembilan kasus anak dan tujuh kasus perempuan. Kebanyakan kasus anak didominasi dengan kekerasan seksual yaitu sebanyak tujuh kasus dari sembilan kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi dengan kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) yaitu 6 kasus dari tujuh kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan untuk cakupan penanganan korban yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit sebanyak sembilan korban, yang terdiri dari pemeriksaan visum bagi korban kekerasan. Layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan yaitu sebanyak 16 yang merupakan layanan pemulihan dari gangguan baik kondisi fisik, psikis maupun sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, layanan ini berupa konseling terhadap korban, keluarga ataupun masyarakat sekitar. Dari beberapa korban hanya ada delapan korban yang mendapatkan layanan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan. Sedangkan untuk yang lain diselesaikan secara damai dengan mediasi. Cakupan reintegrasi social sebanyak satu korban, dengan mencarikan orangtua / keluarga pengganti yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.

Persoalan dalam penanganan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu hanya dilakukan oleh sumber daya yang ada. Sedangkan untuk penanganan korban yang mengalami trauma berat diperlukan psikolog. Pada saat ini Kabupaten Balangan belum memiliki tenaga ahli psikolog, sehingga selama ini untuk penanganan korban kekerasan harus dibawa ke psikolog di Kabupaten lain.

Perencanaan penganggaran yang responsive gender merupakan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana telah tersirat dalam RPJMN serta dalam upaya pencapaian kesejahteraan gender yang tercantum dalam salah satu butir SDG's. Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD kabupaten pada tahun 2020 adalah sebesar 12,35%.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Persentase perkawinan usia anak di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, dimana persentase perkawinan usia anak pada tahun 2020 adalah sebesar 1,48 %. Dari 1.820 orang yang melaksanakan perkawinan, terdapat 27 orang usia anak berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Perkawinan usia anak tertinggi berada di Kecamatan Lampihong sebanyak tujuh orang. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan upaya meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan serta mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk guna penguatan ekonomi desa. Indeks Desa Membangun juga didukung seiring terbentuknya Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2004 yang memberikan ruang guna terciptanya desa yang mandiri dan (Indeks Desa Membangun Kementerian Desa & Daerah Tertinggal, Kemendesa 2015). Indeks Desa Membangun memiliki sejumlah klasifikasi status desa yang mengkategorikan perkembangan pembangunan sebuah desa, di antaranya Desa Sangat Tertinggal $IDM \leq 0,4907$, Desa Tertinggal $0,4907 < IDM \leq 0,5989$, Desa Berkembang $0,5989 < IDM \leq 0,7072$, Desa Maju $0,7072 < IDM \leq 0,8155$, Desa Mandiri $IDM > 0,8155$ (Standar Operasional Prosedur Pengukuran Indeks Desa Membangun, Kemendesa 2019).

Desa maju meningkat dari 3 desa pada tahun 2019 menjadi 12 desa pada tahun 2020, demikian pula dengan desa berkembang meningkat dari 116 desa menjadi 127 desa, desa tertinggal dari 28 desa menjadi 14 desa. Namun pada tahun 2020 terdapat 1 desa sangat tertinggal, yaitu Desa Wonorejo. Desa ini pada tahun 2019 tidak dimasukkan dalam verifikasi IDM manual karena sudah tidak ada kegiatan apapun di desa tersebut dan dianggap sudah bergabung dengan desa Sumber Rejeki. Namun dalam verifikasi IDM 2020 via aplikasi, desa tersebut statusnya masih sebagai desa di Kabupaten balangan karena penghapusan dan penggabungannya belum di sahkan oleh Kemendagri.

Keberhasilan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Balangan terlihat dari kenaikan nilai IDM dari Tahun 2019 (0,6313) dengan status IDM Berkembang di tahun 2020 menjadi (0,6395) dengan status IDM Berkembang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja indikator IDM dapat disimak pada paparan berikut ini:

- a) Ada beberapa program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mendukung capaian tersebut yaitu Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan pelatihan keterampilan manajemen BUMDES, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan Pembinaan PKK, Sosialisasi Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).

- b) Adanya dukungan Pemerintah Pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan pengucuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya.
- c) Adanya kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa.
- d) Adanya kebijakan kepala daerah untuk menyelenggarakan pendampingan kepada desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dengan dana bersumber dari APBD Kabupaten Balangan.
- e) Adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai IDM dapat dilihat melalui komponen indeks komposit tersebut yaitu (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) terdiri dari keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah. (3) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang terdiri dari kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
 - a) Peningkatan pelayanan sosial dasar seperti meningkatnya kinerja kader posyandu dalam memberikan layanan yang berdampak pada meningkatnya presentasi warga memperoleh layanan kesehatan serta BPJS.
 - b) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan di desa sehingga terjangkau oleh masyarakat.
 - c) Meningkatnya PAUD sebagai lembaga pendidikan usia dini di desa.
 - d) Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi.
 - e) Tersedianya akses informasi berupa layanan internet di desa.
- 2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
 - a) Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yaitu BUMDES.

b) Keragaman produksi masyarakat seperti UP2K, UMKM, UPPKS yang dilaksanakan oleh PKK Desa, Dinas Perindustrian koperasi UMKM, dinas perdagangan serta perusahaan.

3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

IKL menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan yang berimbas pada penurunan bencana dan penanganan bencana.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok untuk membantu kepala Daerah/Bupati melaksanakan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kepala daerah. Isu-isu strategis perencanaan pembangunan dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang antara lain adalah sebagai berikut :

Tantangan

1. Masyarakat menuntut hasil pelaksanaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan social
2. Data dan informasi yang akurat sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan;
3. Pembangunan di bidang sosial dituntut untuk lebih dinamis, berkesinambungan dan ditingkatkan seiring semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat;
4. Kompetensi dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.
5. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait program kegiatan yang responsif gender.
6. Pemahaman terhadap konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender yang masih terbatas disemua tingkatan.

7. Belum optimalnya bentuk fasilitasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi terhadap penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang berprespektif gender.
8. Masih adanya perkawinan anak di bawah umur 18 tahun
9. Belum terbentuknya UPT. PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
10. Belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa
12. Rendahnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan
13. Kurangnya desa yang menerapkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE

Peluang

1. Adanya visi dan misi serta kebijakan dan regulasi pemerintah yang menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan referensi data yang akurat dalam implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara konsisten serta monitoring evaluasi kegiatan merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang sosial;
3. Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan bidang sosial;
4. Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendukung usaha kesejahteraan sosial
5. Adanya komitmen kepala daerah/Bupati kabupaten Balangan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang responsif gender.
6. Telah terbentuknya PUSPAGA yang merupakan wadah bagi calon Pengantin untuk mendapatkan konseling Pra nikah.
7. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa terpadu
8. Koordinasi dengan pihak–pihak terkait berjalan dengan baik ;

9. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa;
10. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara keseluruhan target kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2016-2021 telah tercapai dengan baik, meskipun ada beberapa sasaran dari kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat tercapai. Dalam dokumen ini memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program hasil review terhadap rancangan awal RKPD beserta indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan masing-masing program yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan lampiran Tabel TC.31 tentang Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 yaitu ada program dan kegiatan sama tetapi besaran anggaran berbeda dengan ranwal yang dibagikan, dikarenakan pada proses perencanaan ada kegiatan yang lebih prioritas, sehingga memerlukan anggaran yang besar, terutama pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dimana kenyataannya pada DPPPA belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Untuk bidang teknisnya lainya juga berbeda pagu indikatifnya dengan ranwal yang dibagikan dikarenakan menyesuaikan indikator kinerja yang akan dicapai.

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kabupaten Balangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)		-5	(6)	(7)	(8)	(9)	-10	(11)	(12)
Urusan Bidang Sosial												
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		76,48	Rp 1.576.820.100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76,48	Rp 10.078.864.976,00	
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	%	100%				Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	%	100%	Rp 43.900.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	Rp 87.026.000,00	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	Rp 16.350.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 55.766.000,00	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	2 Dokumen	Rp 27.550.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Dokumen	Rp 31.260.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	100%	Rp -	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	Rp 8.102.437.376,00	
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	%	100%	Rp -	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balangan	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	Rp 8.102.437.376,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	%	100%	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balangan	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	Rp 50.000.000,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	Rp -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Balangan	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	12 Dokumen	Rp 26.000.000,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	Rp 129.440.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 194.200.000,00	
	4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Stell	110	Rp 65.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	110	Rp 96.200.000,00	
				Jumlah kain sasirangan yang diadakan	lembar	110				Jumlah kain sasirangan yang diadakan	110		
	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	20	Rp 64.440.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Rp 98.000.000,00	
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	%	100%	Rp 454.993.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balangan	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	Rp 434.611.400,00	
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balangan	Persentasi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	%	100%	Rp 10.864.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balangan	Persentasi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	100%	Rp 15.727.800,00	
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balangan	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	%	100%	Rp 95.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balangan	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100%	Rp 46.550.000,00	
	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balangan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	buah	100	Rp 29.409.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balangan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100	Rp 34.817.300,00	
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	eksamplar	480	Rp 9.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	480	Rp 9.600.000,00	
	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balangan	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100%	Rp 310.119.700,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balangan	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Rp 327.916.300,00	
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balangan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	%	100%	Rp 19.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balangan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	100%	Rp -	
	11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli	Buah	0	Rp -	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli	0	Rp -	
	12	Pengadaan Mebel	Balangan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Buah	0	Rp 19.500.000,00	Pengadaan Mebel	Balangan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	0	Rp -	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	Rp 645.422.900,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Rp 887.522.500,00	
	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balangan	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	%	100%	Rp 500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balangan	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	100%	Rp 900.000,00	
	14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balangan	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100%	Rp 284.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balangan	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp 350.400.000,00	
	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12 bulan	Rp 360.522.900,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	Rp 536.222.500,00	
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	Rp 283.563.700,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balangan	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Rp 373.067.700,00	
	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balangan	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan Layak Fungsi	%	100%	Rp -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balangan	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan Layak Fungsi	100%	Rp 186.533.850,00	
	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	%	100%	Rp 283.563.700,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	Rp 186.533.850,00	
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Balangan	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	78%	Rp 300.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Balangan	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	78%	Rp 413.725.000,00	
8		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Balangan	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan	KK	110 KK	Rp 32.000.000,00	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Balangan	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan	110 KK	Rp 31.590.000,00	
	18	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Balangan	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	Lokasi	1 lokasi	Rp 22.000.000,00	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Balangan	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	1 lokasi	Rp 22.000.000,00	
	19	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Balangan	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	KK	70	Rp 10.000.000,00	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Balangan	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	70	Rp 9.590.000,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

9		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	Buah	2 Buah	Rp 4.000.000,00	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	2 Buah	Rp 5.485.000,00	
	20	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balangan	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	Kali	2 kali	Rp 4.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Balangan	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	2 kali	Rp 5.485.000,00	
10		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan		6.054	Rp 264.000.000,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan	6.054	Rp 376.650.000,00	
	21	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	Orang	16	Rp 20.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	40	Rp 52.300.000,00	
	22	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terampil	TKSK	8 TKSK	Rp 80.000.000,00	Advokasi kebijakan dan pendampingan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Balangan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	8 TKSK	Rp 79.850.000,00	
	23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	KK	6.000	Rp 150.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	9.336	Rp 230.850.000,00	
			Balangan	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi	KK	3.757			Balangan	Jumlah penyaluran Bhakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	3.757		
	24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	LKS (Lembaga kesejahteraan Sosial)	8	Rp 14.000.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	8	Rp 13.650.000,00	
3		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Balangan	Persentase cakupan PPKS (lansia, Disabilitas, Anak Terlantar , Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	%	100,00%	Rp 199.999.900,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Balangan	Persentase cakupan PPKS (lansia, Disabilitas, Anak Terlantar , Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100,00%	Rp 500.915.500,00	
	11	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Balangan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	800	Rp 199.999.900,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Balangan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	800	Rp 500.915.500,00	
	25	Penyediaan Permakanan	Balangan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	600 Orang	84.625.000,00	Penyediaan Permakanan	Balangan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	600 Orang	203.425.000,00	
	26	Penyediaan Alat Bantu	Balangan	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	Orang	185	Rp 25.375.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Balangan	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	185	Rp 163.660.600,00	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

	27	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balangan	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	Orang	27	Rp 18.000.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Balangan	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	27	Rp 33.380.000,00
	28	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balangan	Jumlah anak terlantar yang dilayani	Orang	10	Rp 2.000.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Balangan	Jumlah anak terlantar yang dilayani	10	Rp 2.000.000,00
	29	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Balangan	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	15	Rp 69.999.900,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Balangan	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20	Rp 98.449.900,00
			Balangan	Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan	Orang	5			0	Balangan	Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan	
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Balangan	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%	67%	Rp 150.000.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Balangan	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	67%	Rp 4.412.192.603,00
12		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	KK	12.065	Rp 150.000.000,00		Balangan	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	12.065	Rp 4.412.192.603,00
	30	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	KK	12.000	Rp 50.000.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	12.000	Rp 168.140.000,00
	31	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balangan	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial bersyarat	%	100%	Rp	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Balangan	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial bersyarat	100%	Rp 4.090.043.003,00
	32	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balangan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	Kelompok	64	Rp 100.000.000,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Balangan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	64	Rp 154.009.600,00
			Balangan	Jumlah Rumah layak huni setelah mendapat bantuan	Buah							
5		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Balangan	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100%	Rp 150.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Balangan	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	Rp 270.361.000,00
	13	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	KK	500	Rp 50.000.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	500	Rp 170.361.000,00
	33	Penyediaan Makanan	Balangan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	KK	500	Rp 50.000.000,00	Penyediaan Makanan	Balangan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	500	Rp 170.361.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	Orang	73	Rp 100.000.000,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	73	Rp 100.000.000,00	
34	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balangan	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	Orang	72 Orang	Rp 100.000.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Balangan	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	72 Orang	Rp 100.000.000,00	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Balangan	Persentase makam yang terawat	%	100%	Rp 35.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Balangan	Persentase makam yang terawat	100%	Rp 35.000.000,00	
15	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	Buah	1 Buah	Rp 35.000.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	1 Buah	Rp 35.000.000,00	
35	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	Buah	1 buah	Rp 35.000.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	1 buah	Rp 35.000.000,00	
						2.411.820.000						
										15.711.059.079		

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
1			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Balangan	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	%	21,00	100.000.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Balangan	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	21,00	1.004.335.000
					IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		72				IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	72	
					IPG (Indeks Pembangunan gender)		92,74				IPG (Indeks Pembangunan gender)	92,74	
1			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Balangan	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Lembaga Pemerintah	30		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Balangan	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30	87.470.000
	1		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Orang	200		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	200	13.240.000
	2		Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Balangan	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	Orang	50		Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Balangan	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	50	74.230.000
2			Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	Organisasi	3		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	3	916.865.000
	3		Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi	Balangan	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	150		Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi	Balangan	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	150	16.865.000
	4		Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Organisasi	3		Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3	900.000.000
Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan					Paket	220	Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan				220		
Jumlah penyaluran Bhakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan					Paket	10	Jumlah penyaluran Bhakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan				10		

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Balangan	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	50.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Balangan	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100	65.103.000
3		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Balangan	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	desa	4		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Balangan	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4	41.560.000
	5	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi , advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	orang	264		Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi , advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	264	41.560.000
4		Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasanyang mmeerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota	Balangan	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	lembaga	2		Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasanyang mmeerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota	Balangan	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2	23.543.000
	6	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	%	100		Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	100	23.543.000
3		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Balangan	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	%	17,26	200.000.000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Balangan	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	0	173.937.300
	5	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Indeks Kualitas Keluarga (Rata-rata)	%	61		Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Indeks Kualitas Keluarga (Rata-rata)	1	109.087.300
	7	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Balangan	Jumlah pembinaan desa	Kali	10		Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Balangan	Jumlah pembinaan desa	10	109.087.300
				Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	Orang	15			Balangan	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	15	
	6	Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	%	77		Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	77	64.850.000
	8	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Balangan	1. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Orang	450		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Balangan	1. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	450	64.850.000
				2. Jumlah klien pada PUSPAGA	Orang	200			Balangan	2. Jumlah klien pada PUSPAGA	200	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

4		Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Balangan	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	%	100	100.000.000	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Balangan	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100	94.445.000	
	7	Pengumpulan ,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	dokumen	1		Pengumpulan ,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	1	94.445.000	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	Tabel	122		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	122	62.915.000	
	9			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik	Dokumen	1				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik	1		
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website	Dokumen	12		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website	12	31.530.000	
	10												
5		Pemenuhan Hak Anak	Balangan	IPA (Indeks Perlindungan Anak)		68	200.000.000	Pemenuhan Hak Anak	Balangan	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	68	207.540.000	
	8	Kegiatan : Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Persentase Desa Layak Anak	%	4		Kegiatan : Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Persentase Desa Layak Anak	4	95.820.000	
					desa	5					5		
		Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Balangan	1. jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	orang	225		Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Balangan	1. jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	225	73.215.000	
	11			2. jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak	orang	54				2. jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak	54		
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	1. jumlah sekolah yang ramah anak	buah	21		Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	1. jumlah sekolah yang ramah anak	21	22.605.000	
	12			2. jumlah ponpes yang memenuhi kriteria ramah anak	buah	3				2. jumlah ponpes yang memenuhi kriteria ramah anak	3		
				3. jumlah mesjid yang memenuhi kriteria ramah anak	buah	5				3. jumlah mesjid yang memenuhi kriteria ramah anak	5		
				4. jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak	orang	100				4. jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak	100		

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

9	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	%	100			Balangan	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100	111.720.000	
13	Sub Kegiatan : Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Kader Posyandu, Lembaga dan Masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak	orang	314		Sub Kegiatan : Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah Kader Posyandu, Lembaga dan Masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak	314	19.395.000	
14	Sub Kegiatan :Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak	Balangan	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	Kelompok	5		Sub Kegiatan :Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak	Balangan	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	5	53.280.000	
15	Sub Kegiatan : Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak	Balangan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	Kecamatan	2		Sub Kegiatan : Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak	Balangan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	2	24.360.000	
16	Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Balangan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	orang	35		Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Balangan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	35	14.685.000	
		Balangan	Jumlah Ruang Laktasi	buah	3			Balangan	Jumlah Ruang Laktasi	3		
		Balangan	Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak	buah	12			Balangan	Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak	12		
6	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Balangan	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	%	100	100.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Balangan	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100	102.614.000	
10	Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Balangan	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	buah	15		Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Balangan	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	15	16.820.000	
17	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	orang	150		Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Balangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	150	16.820.000	
11	Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Balangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	indeks	78		Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Balangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	78	44.774.000	
18	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Persentase korban anak yang terlayani	%	100			Balangan	Persentase korban anak yang terlayani	100	44.774.000	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga	4		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4	41.020.000	
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan kader PATBM	orang	270		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Balangan	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan kader PATBM	270	41.020.000	
			Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa	orang	150		Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa		150			
TOTAL						750.000.000					1.647.974.300	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Balangan	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan		100%	100.000.000	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Balangan	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	100%	112.280.300	
	1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Balangan	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa		1		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Balangan	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	1	112.280.300	
	1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Balangan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi		1		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Balangan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi	1	112.280.300	
2		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	%	80%	2.000.000.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	80%	2.327.316.000	
	2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Orang	154		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	154	2.327.316.000	
	2	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	%	92%		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Balangan	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	92%	1.552.320.000	
	3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Balangan	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	Desa	154		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Balangan	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	154	27.705.000	
	4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Balangan	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Desa	154		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Balangan	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	154	157.505.000	
	5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Balangan	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	%	75%		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Balangan	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	75%	414.860.000	
	6	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Balangan	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	Desa	154		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Balangan	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	154	43.550.000	
	7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Balangan	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	%	70%		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Balangan	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	70%	54.770.000	
	8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Balangan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang		9		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Balangan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	9	76.606.000	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

3		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Balangan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang		50%	5.000.000.000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Balangan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	50%	5.260.403.700	
3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Balangan	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa	10		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Balangan	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	10	5.260.403.700	
	9	Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Balangan	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	orang	80		Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Balangan	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	80	299.000.000	
	Balangan		Jumlah Kader Posyandu yang terampil	orang	80	Balangan			Jumlah Kader Posyandu yang terampil	80			
	Balangan		Jumlah LPM dibina	lembaga	8	Balangan			Jumlah LPM dibina	8			
	Balangan		Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	orang	164	Balangan			Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	164			
	10	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Balangan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD		56		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Balangan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	56	3.506.180.000	
	11	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balangan	Jumlah Posyantek di desa	desa	40		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balangan	Jumlah Posyantek di desa	40	127.000.000	
	Balangan		umlah KP-Spams di desa		140	Balangan			umlah KP-Spams di desa	140			
	Balangan		umlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi		3	Balangan			umlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi	3			
	12	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Balangan	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina		165		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Balangan	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina	165	1.328.223.700	
							7.100.000.000					7.700.000.000	
TOTAL KESELURUHAN							10.261.820.000					25.059.033.379	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua Pemangku kepentingan.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). RPJM I (2005-2010) yaitu menata Kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJMN II (2010-2015) yaitu memantapkan penataan Kembali Indonesia di segala bidang dengan meningkatkan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN III (2015-2019) yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN IV (2020-2024) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya bersaing.

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN IV (2020-2024) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya bersaing.

Arah kebijakan dari Kementerian Sosial antara lain:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Arah kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Penurunan pekerja anak
5. Pencegahan perkawinan anak

Arah kebijakan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Peningkatan konektivitas intra dan antar pedesaan
2. Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul
3. Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan
4. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital
5. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.
7. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan antar K/L/D/M.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Adapun Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

- Urusan Sosial :
Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

3.2.2 Sasaran

Dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

- Urusan Sosial :
Meningkatnya produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 1. Meningkatkan kesetaraan gender
 2. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya klasifikasi desa

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /	Target	
				Indikator Sasaran	2022	2026
1.	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosia (PPKS) yang tertangani	Meningkatnya produktifitas Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosia (PPKS) yang tertangani	52,95%	76,95%
2.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Meningkatnya kesetaraan gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,74	92,86
				IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	72	76
				Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada belanja langsung APBD	21	21,2
			Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14	13,6
Rasio Kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	1,9	1,5				
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Perkembangan status pembangunan desa dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang menuju maju dan	Meningkatnya Klasifikasi Desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Maju	23,38	44,16

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan sebanyak 15 Program, 29 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan sebagai berikut :

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

KAB/KOTA, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
- b. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

- PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

- PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
 - a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

- PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka rencana program dan kegiatan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan sebanyak 15 Program, 29 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
Urusan Bidang Sosial													
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Balangan	76,48	Rp 10.154.864.976,00		76,49	Rp 10.584.698.224,80
						Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	%		100%			100%	
1	06	01	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	%	Balangan	100%	Rp 87.026.000,00	100%	Rp 91.377.300,00
1	06	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	Balangan	2 Dokumen	Rp 55.766.000,00	2 Dokumen	Rp 58.554.300,00
1	06	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Realisasi Kinerja	Dokumen		2 Dokumen	Rp 31.260.000,00	2 Dokumen	Rp 32.823.000,00
1	06	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	Balangan	100%	Rp 8.178.437.376,00	100%	Rp 8.587.359.244,80
1	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	%		100%	Rp 8.102.437.376,00	100%	Rp 8.507.559.244,80
1	06	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	%		100%	Rp 50.000.000,00	100%	Rp 52.500.000,00
1	06	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan SKPD	Dokumen		12 Dokumen	Rp 26.000.000,00	12 Dokumen	Rp 27.300.000,00
1	06	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	Balangan	100%	Rp 194.200.000,00	100%	Rp 126.000.000,00
1	06	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Stell		110	Rp 96.200.000,00	110	Rp 23.100.000,00
						Jumlah kain sasirangan yang diadakan		lembar	110	110			
1	06	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		20	Rp 98.000.000,00	20	Rp 102.900.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

1	06	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	%	Balangan	100%	Rp 434.611.400,00			100%	Rp 456.341.970,00
1	06	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentasi ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	%		100%	Rp 15.727.800,00			100%	Rp 16.514.190,00
1	06	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	%		100%	Rp 46.550.000,00			100%	Rp 48.877.500,00
1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	buah		100	Rp 34.817.300,00			100	Rp 36.558.165,00
1	06	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	eksamplar		480	Rp 9.600.000,00			480	Rp 10.080.000,00
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%		100%	Rp 327.916.300,00			100%	Rp 344.312.115,00
1	06	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	%	Balangan	100%	Rp -			100%	Rp -
1	06	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli	Buah		0	Rp -			0	Rp -
1	06	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Buah		0	Rp -			0	Rp -
1	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	Balangan	12	Rp 887.522.500,00			12	Rp 931.898.625,00
1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	%		100%	Rp 900.000,00			100%	Rp 945.000,00
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%		100%	Rp 350.400.000,00			100%	Rp 367.920.000,00
1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan		12 bulan	Rp 536.222.500,00			12 bulan	Rp 563.033.625,00
1	06	1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	Balangan	12	Rp 373.067.700,00			12	Rp 391.721.085,00
1	06	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan Layak Fungsi	%		100%	Rp 186.533.850,00			100%	Rp 195.860.542,50
1	06	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	%		100%	Rp 186.533.850,00			100%	Rp 195.860.542,50

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	Balangan	78%	Rp 483.725.000,00			81%	Rp 507.911.250,00
1	06	02	2			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan	KK	Balangan	110 KK	Rp 101.590.000,00			120 KK	Rp 106.669.500,00
1	06	02	2	01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang di petakan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	Lokasi	Balangan	1 lokasi	Rp 92.000.000,00			1 Lokasi	Rp 96.600.000,00
1	06	02	2	01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	KK	Balangan	70	Rp 9.590.000,00			80	Rp 10.069.500,00
1	06	02	2			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diberikan	Buah	Balangan	2 Buah	Rp 5.485.000,00			2 Buah	Rp 5.759.250,00
1	06	02	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	Kali	Balangan	2 kali	Rp 5.485.000,00			2 kali	Rp 5.759.250,00
1	06	02	2			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan		Balangan	6.054	Rp 376.650.000,00			7056	Rp 395.482.500,00
1	06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	Orang	Balangan	40	Rp 52.300.000,00			40	Rp 54.915.000,00
1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terampil	TKSK	Balangan	8 TKSK	Rp 79.850.000,00			8 TKSK	Rp 83.842.500,00
1	06	02	2	03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	KK	Balangan	9336	Rp 230.850.000,00			9336	Rp 242.392.500,00
						Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi	KK	Balangan	3757				3757		
1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	LKS (Lembaga kesejahteraan Sosial)	Balangan	8	Rp 13.650.000,00			10	Rp 14.332.500,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

1	06	04	2		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase cakupan PPKS (lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial</i>	%	Balangan	100,00%	Rp 900.915.500,00			100,00%	Rp 945.961.275,00
1	06	04	2	01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	Balangan	800	Rp 900.915.500,00			800	Rp 945.961.275,00
1	06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	Balangan	600 Orang	203.425.000,00		600 Orang	Rp 213.596.250,00
1	06	04	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan sandang	Orang	Balangan	0	-		0	Rp -
1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bantuan alat Bantu	Orang	Balangan	185	Rp 163.660.600,00		185	Rp 171.843.630,00
1	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS (Lansia, Penyandang disabilitas, korban NAFZA, pengemis dan tuna sosial) yang dibimbing di panti rehabilitasi	Orang	Balangan	27	Rp 33.380.000,00		27	Rp 35.049.000,00
1	06	04	2	01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang dilayani	Orang	Balangan	10	Rp 402.000.000,00		10	Rp 422.100.000,00
1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	Balangan	20	Rp 98.449.900,00		20	Rp 103.372.395,00
							Jumlah wanita rawan sosial yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta bantuan alat keterampilan	Orang	Balangan	8			8	
1	06	04	2	01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Orang	Balangan	0	Rp -		0	Rp -
1	06	04	2			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang dilayani	Orang	Balangan	60 orang	Rp -		60 orang	Rp -
1	06	04	2	02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah peralatan dan bahan tes urine yang disediakan	Orang	Balangan	0	-		0	Rp -
1	06	04	2	02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah orang terlantar yang dilayani	Orang	Balangan	0	-		0	Rp -

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

1	06	05	2			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%	Balangan	67%	Rp 4.412.192.603,00			69%	Rp 4.632.802.233,15
1	06	05	2			<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah data fakir miskin yang dilakukan pemutakhiran terpadu penanggulangan kemiskinan	KK	Balangan	12.065	Rp 4.412.192.603,00			12071	Rp 4.632.802.233,15
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT yang diValidasi	KK	Balangan	12.000	Rp 168.140.000,00			12.000	Rp 176.547.000,00
1	06	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase jiwa yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial bersyarat	%	Balangan	100%	Rp 4.090.043.003,00			100%	Rp 4.294.545.153,15
1	06	05	2	02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan KUBE	Kelompok	Balangan	2	Rp 154.009.600,00			4	Rp 161.710.080,00
							Jumlah Rumah layak huni setelah mendapat bantuan		Balangan	2				4	
1	06	06	2			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</i>	%	Balangan	100%	Rp 270.361.000,00			100%	Rp 283.879.050,00
1	06	06	2			<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan	KK	Balangan	500	Rp 170.361.000,00			500	Rp 178.879.050,00
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	KK	Balangan	500	Rp 170.361.000,00			500	Rp 178.879.050,00

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

1	06	06	2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	Orang	Balangan	73	Rp 100.000.000,00			73	Rp 105.000.000,00
1	06	06	2	02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga yang dibentuk	Buah	Balangan	0	Rp -		0	Rp -
1	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	Orang	Balangan	72 Orang	Rp 100.000.000,00		72 Orang	Rp 105.000.000,00
1	06	07	2			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	%	Balangan	100%	Rp 35.000.000,00		100%	Rp 36.750.000,00
1	06	07	2	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dirawat	Buah	Balangan	1 Buah	Rp 35.000.000,00		1 Buah	Rp 36.750.000,00
1	06	07	2	01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana makam pahlawan yang direhabilitasi	Buah	Balangan					Rp -
1	06	07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	Buah	Balangan	1 buah	Rp 35.000.000,00		1 buah	Rp 36.750.000,00
TOTAL										16.181.059.079				16.992.002.033

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
2	8	02				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	%	Balangan	21,00	1.004.335.000	DPA DPPPA	21,05	1.005.000.000	
							IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)			72			73,02		
							IPG (Indeks Pembangunan gender)			92,74			92,77		
2	08	02	2	01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Lembaga Pemerintah	Balangan	30	87.470.000		30	87.291.750	
2	08	02	2	01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Orang	Balangan	200	13.240.000		40	13.902.000	
2	08	02	2	01	03	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	Orang	Balangan	50	74.230.000		200	73.389.750	
2	08	02	2	02		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	Organisasi	Balangan	1	916.865.000		3	917.708.250	
2	08	02	2	02	01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	Balangan	150	16.865.000		150	17.708.250	
2	08	02	2	02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Organisasi	Balangan	3	900.000.000			3	900.000.000
							Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	Paket		220				220	
							Jumlah penyaluran Bhakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	Paket		10				11	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	%	Balangan	100	65.103.000			100	68.358.150
2	08	03	2	01		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	desa	Balangan	4	41.560.000			4	43.638.000
2	08	03	2	01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi , advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	orang	Balangan	264	41.560.000			264	43.638.000
2	08	03	2	02		Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasanyang mmeerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	lembaga	Balangan	2	23.543.000			2	24.720.150
2	08	03	2	02	01	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	%	Balangan	100	23.543.000			100	24.720.150
2	08	04				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	%	Balangan	17,26	173.937.300			16,56%	176.335.000
2	08	04	2	01		Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	%	Balangan	61	109.087.300			62	105.000.000
2	08	04	2	01	03	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pembinaan desa	Kali	Balangan	10	109.087.300			10	105.000.000
						Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	Orang	15		15					
2	08	04	2	03		Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	%	Balangan	77	64.850.000			79	71.335.000
2	08	04	2	03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Orang	Balangan	360	64.850.000			450	71.335.000
						2. Jumlah klien pada PUSPAGA	Orang	200		200					

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2	08	05				Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	%	Balangan	100	94.445.000			100	99.167.250
2	08	05	2	01		Pengumpulan ,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	dokumen	Balangan	1	94.445.000			1	99.167.250
2	08	05	2	01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	Tabel	Balangan	122	62.915.000			122	66.060.750
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik	Dokumen	1		1					
2	08	05	2	01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website	Dokumen	Balangan	12	31.530.000			12	33.106.500
2	08	06				Pemenuhan Hak Anak	IPA (Indeks Perlindungan Anak		Balangan	68	207.540.000			68,25	217.587.000
2	08	06	2	01		Kegiatan : Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Persentase Desa Layak Anak	% desa	Balangan	4 5	95.820.000			4 6	100.281.000
						Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	1. jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di desa	orang		225		73.215.000			
							2. jumlah anggota GT KLA yang mengetahui tentang pemenuhan hak anak	orang	54	54					
2	08	06	2	01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	1. jumlah sekolah yang ramah anak	buah	Balangan	21	22.605.000			21	23.735.250
						2. jumlah ponpes yang memenuhi kriteria ramah anak	buah	3		2					
						3. jumlah mesjid yang memenuhi kriteria ramah anak	buah	5		5					
						4. jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pola asuh dalam pengasuhan anak	orang	100		100					

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2	08	06	2	02		Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	%	Balangan	100	111.720.000			100	117.306.000
2	08	06	2	02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Kader Posyandu, Lembaga dan Masyarakat yang terlatih pemenuhan hak anak	orang	Balangan	314	19.395.000			314	20.364.750
2	08	06	2	02	02	Sub Kegiatan :Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan kualitas hidup anak	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	Kelompok	Balangan	5	53.280.000			6	55.944.000
2	08	06	2	02	03	Sub Kegiatan : Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan profil anak	Kecamatan	Balangan	2	24.360.000			1	25.578.000
2	08	06	2	02	04	Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dan berkompeten dalam pelayanan Puskesmas Ramah Anak	orang	Balangan	35	14.685.000			35	15.419.250
					Jumlah Ruang Laktasi		buah	Balangan	3	3					
					Jumlah Puskesmas yang terstandar ramah anak		buah	Balangan	12	12					
2	08	07				PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	%	Balangan	100	102.614.000			100	105.014.700
2	08	07	2	01		Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	buah	Balangan	15	16.820.000			12	14.931.000
2	08	07	2	01	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	orang	Balangan	150	16.820.000			120	10.000.000
2	08	07	2	01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk pengawasan perlindungan anak dari KPAI, rakor dalam pembuatan Mou dengan instansi vertikal	Dokumen	Balangan	0	-			4	4.931.000

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

2	08	07	2	02	Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	indeks	Balangan	78	44.773.900			80	47.012.700	
2	08	07	2	02	01	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	%	Balangan	100	44.773.900			100	47.012.700
2	08	07	2	03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga	Balangan	4	41.019.900			4	43.071.000	
2	08	07	2	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan kader PATBM	orang	Balangan	120	41.019.900			120	43.071.000
						Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa	orang	60		60					
TOTAL										1.647.974.100				1.671.462.100	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2	13	03				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan		Balangan	100%	112.280.300	DPA DPMD	Balangan	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	330.000.000
2	13	03	2,01			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa		Balangan	1	112.280.300	DPA DPMD	Balangan	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	330.000.000
2	13	03	2,01	03		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi		Balangan	1	112.280.300	DPA DPMD	Balangan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi	110.000.000
2	13	04				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	%	Balangan	80%	2.327.316.000	DPA DPMD	Balangan	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	6.197.910.000
2	13	04	2,01	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Orang	Balangan	154	2.327.316.000	DPA DPMD	Balangan	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	6.197.910.000
2	13	04	2,01	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	%	Balangan	92%	1.552.320.000	DPA DPMD	Balangan	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	1.552.320.000
2	13	04	2,01	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	Desa	Balangan	154	27.705.000	DPA DPMD	Balangan	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	40.000.000
2	13	04	2,01	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Desa	Balangan	154	157.505.000	DPA DPMD	Balangan	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	200.000.000
2	13	04	2,01	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	%	Balangan	75%	414.860.000	DPA DPMD	Balangan	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	550.000.000

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD**

2	13	04	2,01	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	Desa	Balangan	154	43.550.000	DPA DPMD	Balangan	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	59.590.000
2	13	04	2,01	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	%	Balangan	70%	54.770.000	DPA DPMD	Balangan	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	200.000.000
2	13	04	2,01	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang		Balangan	9	76.606.000	DPA DPMD	Balangan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang	120.000.000
2	13	05				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang		Balangan	50%	5.260.403.700	DPA DPMD	Balangan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	5.601.640.000
2	13	05	2,01	01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa	Balangan	10	5.260.403.700	DPA DPMD	Balangan	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	5.601.640.000
						Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	orang	Balangan	80			Balangan	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang terampil	
2	13	05	2,01	01	03		Jumlah Kader Posyandu yang terampil	orang	Balangan	80	299.000.000	DPA DPMD	Balangan	Jumlah Kader Posyandu yang terampil	91.440.000
							Jumlah LPM dibina	lembaga	Balangan	8			Balangan	Jumlah LPM dibina	
							Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	orang	Balangan	164			Balangan	Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, P3A DAN PMD

2	13	05	2,01	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif dan memiliki PAD	Bumdes	Balangan	56	4.253.380.000	DPA DPMD	Balangan	70	3.870.500.000
2	13	05	2,01	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa	Desa	Balangan	40	127.000.000	DPA DPMD	Balangan	45	139.700.000
						Jumlah KP-Spams di desa		Balangan	140	DPA DPMD		Balangan	140		
						Jumlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi	Produk	Balangan	3	DPA DPMD		Balangan	3		
2	13	05	2,01	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat		Balangan		-	DPA DPMD	Balangan	154 Desa	100.000.000
2	13	05	2,01	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina		Balangan	165	1.528.223.700	DPA DPMD	Balangan	165 TP PKK Desa, kelurahan dan Kecamatan	1.400.000.000
TOTAL											8.647.200.000				12.129.550.000
TOTAL KESELURUHAN											26.476.233.179				30.793.014.133

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai aturan arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra kurun waktu satu tahun mendatang. Dan merupakan manifestasi dari respon Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun external, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Selanjutnya dokumen Renja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Rencana Kerja ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua, diperlukan dukungan penuh dari anggaran dan semua aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan pasti akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta anggaran yang mendukung dan kinerja aparatur yang profesional, integritas, gotong royong serta agamis dalam penentu terhadap segala keberhasilan.

Akhir kata semoga penyusunan renja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Renja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan.

Paringin, Desember 2022

Kepala Dinas,



Drs. Urai Nur Iskandar, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730501 199311 1 001